

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya politik adalah fenomena dalam masyarakat yang merupakan bagian dari kehidupan politik, yang memiliki pengaruh terhadap struktur dan sistem politik walaupun seringkali budaya politik dipandang tak lebih hanya sebagai kondisi-kondisi yang mewarnai corak kehidupan masyarakat, tanpa memiliki hubungan baik dengan sistem politik maupun struktur politik.¹ Asumsi itu banyak digunakan sebelum berkembangnya pendekatan yang mendasar pada budaya politik. Sebagaimana dikemukakan ilmuwan politik oleh Gilbert Abcarian dan George S yang dikutip dalam bukunya Arifin rahmat, bahwa salah satu variabel sistem politik adalah kebudayaan politik. Dalam hal ini, kebudayaan politik lebih dimaksudkan sebagai keseluruhan pandangan politik, legitimasi pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijaksanaan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, prilaku aparatur pemerintah serta pandangan masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah, dan bahkan dianggap sebagai pandangan hidup manusia pada umumnya.²

Dalam membahas keterkaitan antara budaya politik dengan sistem politik budaya politik perlu dikedepankan karena menyangkut disiplin ilmu sosial yang berkaitan dengan fenomena masyarakat. Terlebih lagi sistem politik dapat ditinjau sebagai bagian dari ilmu sosial. Dengan meneliti budaya

¹ Afan Gaffar, *Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 27

² Arifin Rahmat, *Sistem Politik Indonesia*, (Surabaya: SIC, 2002), hlm. 31

politik kita mengenal ciri-ciri yang terpokok untuk menguji proses yang berlanjut maupun yang berubah seirama dengan proses perkembangan, perubahan atau mutasi sosial. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijaksanaan pemerintah, kegiatan partai politik, perilaku aparat negara, serta gejala masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah.³

Politik merupakan hal yang tidak terlepas dari kekuasaan sehingga dalam berpolitik dibutuhkan penguasa yang dipercaya oleh rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan politik berarti berbagai macam kegiatan yang terjadi di dalam suatu negara yang berkaitan dengan proses menetapkan tujuan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.⁴ Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpin politik dan lain-lain.

Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi, sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Dengan demikian, budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik di masyarakat. Dalam dunia keagamaan dan dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan, hubungan antara agama dan politik jelas memiliki suatu keterkaitan, namun tetap harus

³ Syahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 112

⁴ Ng. Philipus & Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 104

dibedakan. Disatu pihak, masyarakat agama memiliki kepentingan mendasar agar agama tidak dikotori oleh kepentingan politik, karena bila agama berada dalam dominasi politik, maka agama akan sangat mudah diselewengkan. Akibatnya agama tidak lagi menjadi kekuatan pembebasan atas berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan, sebaliknya agama akan berkembang menjadi kekuatan yang menindas dan kejam. Dipihak lain adalah kewajiban moral agama untuk ikut mengarahkan politik agar tidak berkembang menurut selernya sendiri yang bisa membahayakan kehidupan. Agar agama dapat menjalankan peran moral tersebut, maka agama harus dapat mengatasi politik, bukan terlibat langsung ke dalam politik praktis.⁵

Di Indonesia kita mengenal salah satu kelompok Sosial-Religius yaitu Nahdatul Ulama (untuk selanjutnya disingkat NU) yang berdiri pada tahun 1962 yang telah tampil sebagai organisasi terbesar yang banyak memberikan sumbangan bagi bangsa. Sebagai organisasi sosial keagamaan, NU sejak awal hadir dengan mengedepankan strategi budaya dalam mengembangkan Islam.

Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki puluhan juta massa, NU nyaris selalu terlibat dalam pergulatan politik, dengan basis massa yang begitu besar, NU memang menggiurkan sebagai alat legitimasi politik, terlebih politik Agama. Sebagai organisasi keagamaan tradisional, Di awal kemerdekaan RI, Zuhairi Misrawi sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul muni'im, menegaskan NU mempunyai arti penting bagi proklamasi kemerdekaan. Para kiyai NU mempunyai andil besar, bahkan ikut menegaskan kepemimpinan Bung Karno dengan fatwa "Pemimpin yang mempunyai

⁵ Syahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia...*, hlm. 112

otoritas penuh” demi terbentuknya negara yang adil dan berdaulat.⁶ Kiprah politik NU tak lepas dari nilai-nilai dan norma-norma Islam yang secara baku dirumuskan dalam fiqih, termasuk untuk masalah-masalah politik. Tidak heran jika kemudian muncul terminologi fiqih siyasah atau fiqih politik yang mendasari setiap keputusan politik NU.

Organisasi NU di Tulungagung juga tidak kalah banyak dari daerah-daerah lain, Tulungagung adalah suatu kota yang ada di Jawa Timur, yang di dalamnya terdapat banyak ormas NU yang tentunya berpengaruh terhadap perpolitikan yang ada di Tulungagung. Pada saat pemilihan Gubernur berlangsung, ketua NU cabang Tulungagung, mengaku siap memengangkan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada saat pemilihan Gubernur di Jawa Timur. Untuk memenangkan Pilgub di Tulungagung, NU terus melakukan pendekatan pada masyarakat, dari hati ke hati, kemudian rumah ke rumah ditingkat dusun hingga kecamatan. NU di daerah Tulungagung sudah pasti mempunyai cara dan kebudayaan sendiri dalam berpolitik dengan cara yang sangat baik.⁷

Kebiasaan serta kebudayaan NU dalam berpolitik bermacam-macam, misalnya kebiasaan memilih pemimpin dengan beberapa kriteria, musyawarah Alim Ulama NU pernah mendiskusikan persoalan ini dan berujung pada kesimpulan tidak boleh mencalonkan diri, dicalonkan dan dipilih untuk menduduki jabatan publik (urusan rakyat/umat), jika orang tersebut terkena satu diantara hal berikut: (1) terbukti atau diduga kuat pernah melakukan korupsi, (2) mengabaikan kepentingan rakyat, (3) cenderung memanfaatkan

⁶ *Ibid.*, hlm. 2

⁷ Diambil dari www.Nahdatululamatulungagung, tanggal 14 Desember 2018 jam 20.30 WIB.

jabatanya untuk kepentingan pribadi, (4) gagal dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan sebelumnya.⁸

Menurut data di atas diketahui bahwa NU yang ada di Tulungagung mempunyai cara dan budaya tertentu dalam keterlibatannya dengan bidang politik. Di dalam agama Islam politik biasa dikenal dengan fqih siyasah. Dari paparan di atas, maka penulis tertarik meneliti tentang “Budaya Politik Nahdatul Ulama dalam Perspektif Fiqih Siyasah”(Studi PCNU Tulungagung).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini menyangkut tentang budaya politik Nahdatul Ulama perspektif fiqih siyasah yang peneliti ambil dari sampel PCNU cabang Tulungagung Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana budaya politik NU di Tulungagung?
2. Bagaimana budaya politik NU di Tulungagung dalam perspektif fiqih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis budaya politik NU di Tulungagung.

⁸ *Ibid.*, hlm. 2

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis budaya politik NU di Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti, pembaca atau masyarakat, serta berguna bagi ilmu pengetahuan:

1. Kegunaan teoritis

Menambah khazanah keilmuan, Khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan sebagai acuan peneliti berikutnya untuk meneliti masalah yang sama dan sebagai referensi.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi ormas NU dapat lebih mengerti dan memahami budaya politik yang ada di daerah Tulungagung.
- b. Bagi masyarakat umum khususnya yang tergabung dalam ormas NU, dapat lebih mengerti dan memahami budaya politik yang ada di dalamnya.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam proses penelitian selanjutnya sehingga penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan dan memperoleh hasil yang sempurna.

E. Penegasan Istilah

Untuk memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Budaya politik adalah pola perilaku individu dan orientasinya dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya.⁹
- b. Fiqih siyasah adalah ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.¹⁰
- c. Nahdatul Ulama merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tentram, adil, dan sejahtera.¹¹

2. Penegasan Operasional

⁹ Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru. 2006), hlm.25

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 4

¹¹ Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm 47

Secara Opesional yang dimasud dengan pudaya politik NU di Tulungagung dalam perspektif fiqih siyasah adalah kebiasaan cara berpolitik NU di Tulungagung, kemudian dibandingkan dengan politik Islam atau biasa disebut dengan Fiqih siyasah, jadi maksud dari “judul penelitian” ini adalah Untuk memahami dan mengerti bagaimanakah Budaya Politik NU di Pesanten daerah Tulungagung dalam perspektif fiqih siyasah

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sisitematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan menjadi 3 (Tiga) bagian, sebagai berikut:

1. Bagian awal

Pada bagian ini berisi: halaman sampul (cover). Halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan masing-masing rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Dalam bab ini sebagai pengantar yang merupakan latar belakang masalah yang akan diteliti. Secara rinci dalam

bab ini menjelaskan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA. Dalam bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar, hasil penelitian terdahulu dan kerangka konsep. Secara rinci akan menjelaskan mengenai budaya politik nahdatul ulama dalam perspektif fikih siyasah di PCNU cabang Tulungagung.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN. Dalam bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal yang memuat rancangan penelitian berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini terdapat sub bab yang membahas mengenai profil Tulungagung, paparan data dan hasil penelitian. Secara rinci akan menjelaskan temuan peneliti dalam topik sesuai dengan budaya politik nahdatul ulama di PCNU cabang Tulungagung. Bab ini disusun sebagai upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Dalam bab ini juga berisi tentang budaya politik nahdatul ulama yang dilihat dari perspektif fikih siyasah dengan praktik yang ada di lapangan.

BAB V: PENUTUP. Merupakan bagian akhir dari penulisan yang akan menunjukan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan yang

memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dan ditutup dengan saran yang ditunjukkan kepada para pihak yang dianggap berkepentingan dan keterbatasan-keterbatasan untuk menjelaskan hambatan dan tantangan dalam penelitian ini.

3. Bagian akhir

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.